



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Reses ke-	: I (satu)
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 September 2020.
Pukul	: 13.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr.Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA-K/L TA 2021 2. Pembahasan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK
Hadir Komisi X DPR RI	: 36 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.15 WIB oleh **Dr.Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. PEMBAHASAN RKA-K/L 2021

1. Komisi X DPR RI mengingatkan agar Kemendikbud RI memperhatikan tahapan pembahasan RUU APBN sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan konstitusi Pasal 20A dan Pasal 98 ayat (2) huruf a dan huruf c UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD.
2. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor:692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020, tanggal 5 Agustus 2020, Perihal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA-K/L TA 2021 dan Nota Keuangan RAPBN TA 2021, Kemendikbud RI mengajukan usulan pagu anggaran pada RAPBN TA 2021 sebesar **Rp.81.534.001.080.000,-** (*Delapan puluh satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar satu juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sbb:

Berdasarkan Satker/Unit Utama:

No	Unit Utama	Pagu Sementara
1	Sekretariat Jenderal	29,786,625,696,000
2	Inspektoral Jenderal	211,127,401,000
3	Ditjen PAUD dan Dikdasmen	4,940,475,579,000
4	Balitbang dan Perbukuan	865,910,306,000
5	Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa	491,524,767,000
6	Ditjen Kebudayaan	1,465,617,720,000
7	Ditjen Guru dan Tendik	2,803,279,706,000
8	Ditjen Pendidikan Tinggi	33,041,562,172,000
9	Ditjen Pendidikan Vokasi	7,927,877,733,000
	TOTAL	81,534,001,080,000

Berdasarkan Program:

No	Program	Pagu Anggaran
1	PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	12,351,711,800,000
2	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	975,927,772,000
3	Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	11,690,746,000,000
4	Pendidikan Tinggi	27,625,232,540,000
5	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,228,161,194,000
6	Dukungan Manajemen	23,662,221,774,000
	TOTAL	81,534,001,080,000

B. USULAN PROGRAM-PROGRAM YANG AKAN DIDANAI OLEH DAK

1. Kemendikbud RI menyampaikan alokasi anggaran DAK sebesar **Rp.134.746.399.203.000,-** (*Seratus tiga puluh empat triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu rupiah*), dengan rincian:

a. DAK Non Fisik	116.604.757.000.000,-
b. DAK Fisik	18.141.642.203.000,-
	+/-
	134.746.399.203.000,-

2. Kemendikbud RI menyampaikan arah kebijakan DAK bidang pendidikan, meliputi peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan museum dan taman budaya. Namun ada perubahan implementasinya, yaitu:

- a. **DAK Non Fisik**, penyaluran dana bantuan operasional langsung ke satuan pendidikan, penambahan *unit cost* dasar untuk bantuan operasional PAUD, penyesuaian *unit cost* BOS sesuai dengan kriteria daerah.
- b. **DAK Fisik**, penentuannya melalui pendekatan ketuntasan, mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimum), satu jenis DAK pendidikan yaitu DAK Reguler, satu jenis menu dalam setiap sub bidang yaitu revitalisasi, kontraktual, dan Kepala Sekolah tidak terlibat dalam revitalisasi dan pembangunan.

C. SIKAP DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk menyampaikan rincian program dan kegiatan serta sasaran dan targetnya, dengan memperhatikan antara lain rekomendasi Panja Pembelajaran Jarak Jauh, catatan rapat selama pembahasan Pagu Indikatif RAPBN TA 2021, serta pandangan/catatan Raker hari ini; sebagai bahan pendalaman RDP dengan eselon I Kemendikbud.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan kebijakan DAK Fisik dan Non Fisik, antara lain penghapusan jenis DAK Afirmasi dan DAK Penugasan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI, agar kebijakan dan implementasi DAK (Fisik dan Non Fisik) memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan sesuai kebutuhan masyarakat pendidikan di daerah.
4. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat akan melakukan RDP untuk pendalaman terhadap Program dan Pagu Anggaran (Sementara) RAPBN TA 2021 pada minggu ketiga bulan September 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



Nadiem Anwar Makarim

KETUA RAPAT



Dr. Abdul Fikri Faqih, MM